

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tugas akhir yang berjudul Prosedur Penatausahaan Keuangan Serta Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang pada dasarnya sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Sehingga penatausahaan keuangan daerah di instansi terkait prosedurnya sangat jelas dan juga transparan.

Selain itu, dalam tata cara penyusunan laporan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang juga mengikuti aturan-aturan yang sebagaimana mestinya. Walaupun terkadang terjadi keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban namun masalah tersebut bisa diatasi.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang prosedur penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban bendahara penerimaan di instansi terkait sudah berjalan dengan baik. Artinya, pemerintah daerah dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. Tentu saja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang telah memperlihatkan bahwa mereka bisa mengimplementasikan *good governance* dimana tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Prosedur Penatausahaan Keuangan serta Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kegiatan penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam melaksanakan prosedur penatausahaan keuangan dan mempertanggungjawabkan tetap berada pada tahap-tahap yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaporan.
3. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi misalnya dalam hal keterlambatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebaiknya diminimalisir, karena hal ini bisa menyebabkan tertundanya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hal tersebut.

